

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pembangunan penduduk yang berlangsung cepat di perkotaan negara berkembang, tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak memprihatinkan. Meningkatnya kesenjangan rasio pertumbuhan penduduk dan penyediaan perumahan mengakibatkan permukiman di perkotaan menghadapi berbagai tantangan. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap harga jual rumah yang layak huni pun semakin sulit.¹

Dalam kasus pembangunan yang kurang terorganisir dan pertumbuhan penduduk yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan permukiman kumuh. Permukiman kumuh di perkotaan disebabkan oleh desakan pemenuhan kebutuhan papan yang layak bagi masyarakat dan merupakan masalah serius yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah dan bahkan masyarakatnya sendiri. Pasalnya, persoalan permukiman kumuh yang meningkat setiap tahunnya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial.

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik demi hidup sejahtera. Jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak pun perlu dipenuhi oleh penyelenggara Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengamankan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas atau revitalisasi permukiman kumuh, pencegahan meluasnya

¹ Nirwono Joga, *Mewariskan Kota Layak Huni*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 86.

atau bertumbuhnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Selain itu juga diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam membangun, memelihara permukiman yang layak dan tanpa kumuh. Dengan adanya akomodasi dan integrasi peran antara pemerintah sebagai pemimpin dan masyarakat yang berdaya akan membentuk sinergi dalam memecahkan permasalahan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.²

Terdapat sekitar 35.291 Ha total wilayah perkotaan kumuh di hampir seluruh wilayah Negara Indonesia pada tahun 2016. Jumlah tersebut dapat berkembang jika tidak segera dilakukan pembangunan yang terencana dengan baik.³ Sementara itu, luas wilayah kumuh di Kota Bandung cukup besar dikarenakan Kota Bandung pun merupakan kota yang padat sebagai kota terbesar di Provinsi Jawa Barat. Di tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Bandung mencapai 2.503708 jiwa⁴. Kemudian sesuai yang dilansir dari data tahun 2017 di Data Kelurahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Program NSUP, luas wilayah kumuh di Kota Bandung mencapai 1.254,73 Ha.⁵

Hal ini patut menjadi konsentrasi bagi pemerintah sekitar dan masyarakat karena permukiman kumuh dapat menimbulkan berbagai penyakit sosial, dan dengan menangani permukiman kumuh yang ada maka akan menegakkan pula pilar ekonomi Kota Bandung. Sebagai bentuk dari perhatian mengenai kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengadakan suatu program untuk mewujudkan permukiman yang layak dan meminimalisir wilayah kumuh hingga 0

² *Ibid.*

³ Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*, (Jakarta: Kemen PUPR, 2016)

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Data Strategis Kota Bandung*, (Bandung:: BPS Bandung, 2019), h. 3.

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Daftar Kelurahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Program NSUP.pdf*, diakses pada tanggal 29 November 2019 pukul 8.00.

Ha tanpa ada penggusuran. Oleh karenanya, program KOTAKU diadakan sebagai suatu wadah untuk mewujudkan permukiman layak huni dan tanpa kumuh.

Penyusun berdomisili di Kota Bandung, tepatnya di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi. Wilayah yang ditinggali penyusun merupakan wilayah yang sering dilewati banyak orang, terdapat banyak pendatang baru, dan strategis karena dekat dengan pusat kota. Hal ini pun berpengaruh terhadap kepadatan penduduk di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi. Hal ini terbukti dengan catatan Kantor Kecamatan Sukajadi pada tahun 2017, yakni Kelurahan Sukabungah memiliki penduduk berjumlah 25.353 jiwa, dan merupakan posisi kedua kelurahan dengan penduduk terpadat di antara kelima kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukajadi.⁶ Sementara itu luas wilayah kumuh di Kelurahan Sukabungah mencapai 21,04 Ha dan angka ini lebih besar dibandingkan luas wilayah kumuh di Kelurahan Sukagalih yang masih merupakan wilayah Kecamatan Sukajadi yang mencapai 8,70 Ha.⁷ Berikut jumlah luas kumuh di Kecamatan Sukajadi.

Tabel 1. 1 Luas Kumuh Kelurahan di Kecamatan Sukajadi Tahun 2017

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Kumuh (Ha)
Sukajadi	Sukagalih	8,70
	Sukabungah	21,04

Sumber: Daftar Kelurahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh NSUP

Program KOTAKU berencana untuk mewujudkan wilayah kumuh hingga 0 Ha. Untuk mewujudkannya, program ini kini gencar mensosialisasikan dan merealisasikan programnya di setiap kelurahan di Indonesia, termasuk Kelurahan Sukabungah. Kontribusinya yaitu pemeliharaan drainase lingkungan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mandiri. Pengerjaan

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Kecamatan Sukajadi dalam Angka 2018*, (Bandung: BPS Bandung, 2019), h. 19.

⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Op.Cit.*

proyek pemeliharaan drainase lingkungan tersebut dilaksanakan di sepanjang RW di Kelurahan Sukabungah. Alasan penyusun memilih Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi sebagai lokasi penelitian adalah karena wilayah tersebut merupakan wilayah domisili penyusun dan saat ini Kelurahan Sukabungah telah dilaksanakan Program KOTAKU. Dengan melakukan penelitian ini, penyusun mengharapkan program yang bertujuan untuk membantu pembangunan negara berkelanjutan dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana peranan masyarakat dalam pelaksanaan Program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Sukabungah, dengan judul: Implementasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang, yakni sebagai berikut:

1. Kondisi wilayah perkotaan yang kumuh akan terus berkembang jika tidak ada penanganan pembangunan yang terencana, mendalam, dan tepat sasaran
2. Jumlah penduduk di Kota Bandung berjumlah 2.503708 jiwa pada tahun 2018. Luas permukiman kumuh di Kota Bandung mencapai 1.254,73 Ha.
3. Kelurahan Sukabungah memiliki penduduk berjumlah 25.388 jiwa, dan merupakan posisi kedua kelurahan dengan penduduk terpadat di antara kelima kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sukajadi.
4. Luas wilayah kumuh di Kelurahan Sukabungah sebelum dimulainya program mencapai 21.04 Ha, lebih besar dari luas wilayah kumuh di Kelurahan

Sukagalih yang masih merupakan wilayah Kecamatan Sukajadi yang mencapai 8,70 Ha

5. Sisa permukiman kumuh setelah dilaksanakannya Program KOTAKU di Kelurahan Sukabungah mencapai 16,12 Ha

1.3. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendorong pada pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung?
3. Bagaimana implementasi program KOTAKU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitiannya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui implementasi program KOTAKU terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat, secara akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut.

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menjadi manfaat bagi pengembangan dan proses pembelejaran bidang sosial yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan program pemerintah yang merupakan upaya pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan sosial masyarakat yang menerima manfaatnya.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi yang bersangkutan dalam proses berjalannya program seperti masyarakat, pihak pemerintahan setempat, dan mahasiswa.

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan masyarakat dalam menyikapi program pembangunan dan menjaga dan memelihara hasil pembangunan dan fasilitas yang diberikan pemerintah agar dipergunakan sebaik mungkin, agar pembangunan yang telah dilaksanakan berjalan dengan efektif dan berkelanjutan

2. Bagi Pemerintah

Kegunaan hasil penelitian ini bagi pemerintah yakni dapat dijadikan acuan pemerintah setempat untuk menilai keefektifan program pembangunan, dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan.

3. Bagi Mahasiswa

Kegunaan secara praktis bagi mahasiswa ialah diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih kritis dalam melihat fenomena pembangunan sosial yang ada di

lingkungan sekitar, dan turut berpartisipasi dalam pembangunan sebagai masyarakat dan sesuai dengan porsinya.

1.6. Permasalahan Utama

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang merupakan penggabungan dari fakta-fakta hasil observasi dan kajian kepustakaan.⁸ Kerangka pemikiran pun merupakan model konsep mengenai kolerasi antara teori dan faktor-faktor yang menjadi identifikasi masalah penelitian.⁹ Kerangka pemikiran dibutuhkan untuk memudahkan pemecahan masalah penelitian secara ilmiah. Dalam kerangka pemikiran tercakup suatu acuan untuk memecahkan masalah penelitian menurut para ahli sesuai bidangnya.

Permukiman yaitu kesatuan manusia yang hidup berdampingan dengan aspek-aspek sosial, spiritual, beserta nilai-nilai budaya yang menyertai yang bertempat di kota maupun desa. Dalam penyelenggaraan permukiman dibutuhkan kebijakan dan program demi keseimbangan lingkungan tersebut. Kebijakan dan program dalam wilayah permukiman yang diupayakan oleh pemerintah salah satunya adalah meminimalisir wilayah kumuh. Wilayah kumuh merupakan cerminan pembangunan masyarakat yang tidak merata dan kurang terstruktur.

Integrasi antar berbagai aspek permukiman dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan sangat diperlukan untuk menjamin penanganan kumuh yang menyeluruh. Tanggung jawab pengembangan perkotaan harus berlandaskan kerjasama dari setiap pihak yang berkepentingan dan penerima manfaat. Permukiman kumuh perkotaan dalam pembangunannya memerlukan perencanaan yang mendalam sebagai acuan untuk mewujudkan wilayah tanpa

⁸ Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 125.

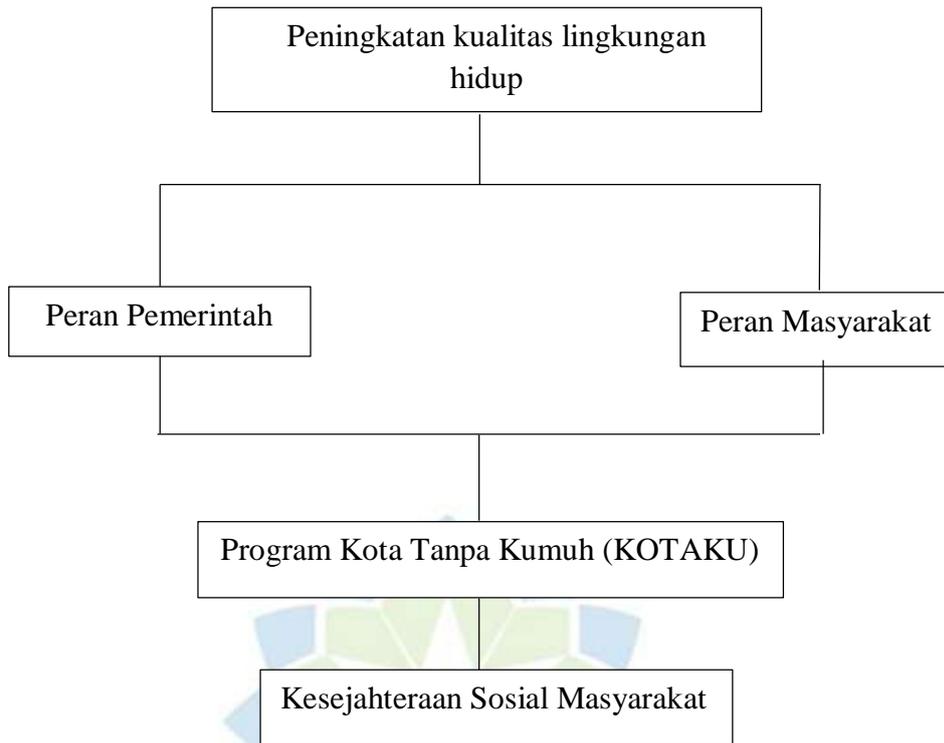
⁹ Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 242.

kumuh. Penyelenggaraan program pembangunan permukiman kumuh perkotaan agar menuju permukiman yang layak huni dan berkelanjutan harus dilakukan oleh pemerintah.

Dengan peran pemerintah sebagai pemimpin dalam pemeliharaan lingkungan perkotaan, maka dicanangkan program Kota Tanpa Kumuh. Program ini berupaya menangani kawasan permukiman kumuh dan pertumbuhannya. Program ini pun bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat. Program Kota Tanpa Kumuh dalam upaya penanganan kumuh memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain program ini menggunakan pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat.

Kesejahteraan sosial umumnya merujuk kepada keadaan yang makmur. Maka keseimbangan dan kesejahteraan sosial masyarakat dirasakan merupakan salah satu tujuan utama dalam kegiatan pembangunan yang komprehensif. Program pelestarian lingkungan yang ada pada dasarnya diadakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.

Berikut model konseptualnya:



Gambar 1.1 Model Konseptual